

MOTTO :

**Sesungguhnya manusia hanyalah
sarana di tangan TUHAN YANG MAHA KUASA**

D A F T A R I S I

	Hal.
P R A K A T A	3
ILMU KEPOLISIAN DAN FUNGSI PTIK.....	4
BAB I. Pendahuluan.....	4
BAB II. Pengetahuan dan Ilmu	6
BAB III. Fungsi PTIK dalam mendukung Pembangunan POLRI ..	18
A. Sedikit Sejarah PTIK	18
B. Fungsi PTIK dalam mendukung Pembangunan POLRI	19
C. Kurikulum PTIK sebagai sarana Pelaksanaan Fungsi.	21
D. Fungsi PTIK dalam hubungannya dengan hal-hal yang non-Polisi	23
BAB IV. Kesimpulan	24
DAFTAR KEPUSTAKAAN	25
DASAR KURIKULUM PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN.	28
Mata Kuliah tingkat Bekaloreat Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.	29
Mata Kuliah tingkat Doktorat I Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.	30
Mata Kuliah tingkat Doktorat II Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.	32

* * *

Dengan pemilihan judul tersebut kami harapkan dapat menyumbangkan sekelumit pemikiran yang mudah-mudahan akan bermanfaat terutama bagi PTIK sebagai suatu Lembaga Pendidikan Tinggi POLRI yang di samping berfungsi untuk membina dan membentuk lanjut Perwira-Perwira POLRI yang berkwalitas tinggi dan cukup cakap untuk melaksanakan tugas-tugas yang akan dibebankan kepadanya, juga sekaligus sebagai wadah yang membina dan mengembangkan Ilmu Kepolisian di Indonesia dan mungkin juga di kalangan kepolisian internasional untuk menunjang pelaksanaan tugas POLRI dan tugas kepolisian pada umumnya selaras dengan dinamika masyarakat dan dunia serta perkembangan ilmu pengetahuan.

Kami harapkan mudah-mudahan materi pidato ini akan bermanfaat bagi Ilmu Kepolisian itu sendiri yang selama ini agaknya belum mendapat tempat yang mantap dalam dunia ilmu pengetahuan, khususnya di Indonesia. Hal ini memanglah tidak mengherankan, oleh karena di samping usia cabang ilmu pengetahuan ini memang masih sangat muda, juga karena memang proses pertumbuhan suatu cabang ilmu pengetahuan, yang baru timbul karena tuntutan kebutuhan umat manusia untuk dapat mengatasi problema-problema baru yang timbul sebagai akibat dari proses pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Para hadirin yang kami muliakan.

Agar penyajian pidato ini tidak menjadi terlalu panjang sehingga memakan waktu yang lama, melampaui waktu yang telah disediakan dan akhirnya menjemukan, maka kami akan mencoba menguraikan materi pidato Dies ini dalam bentuk yang sederhana dan ringkas dengan hanya menonjolkan hal-hal yang sekiranya penting untuk diketengahkan.

Untuk itu maka lingkup permasalahan yang akan disajikan dan sekaligus dibahas dibatasi hanya mengenai hal-hal yang tercakup dalam sistematik sebagai berikut :

- Bab I -- Pendahuluan
- Bab II -- Pengetahuan dan Ilmu.
 - A. Proses timbulnya ilmu pada umumnya.
 - B. Proses timbulnya Ilmu Kepolisian.
- Bab III -- Fungsi PTIK dalam mendukung pembangunan POLRI.
- Bab IV -- Kesimpulan.

BAB II

PENGETAHUAN DAN ILMU

A. PROSES TIMBULNYA ILMU.

Berbicara tentang proses timbulnya sesuatu ilmu, pada pokoknya adalah berbicara mengenai masalah timbulnya dan jalannya pikiran mendapatkan pengetahuan tentang masalah yang diketahui dan dialami oleh manusia atau sekelompok manusia atau masyarakat.

Oleh karena itu maka periodenya dapat dibagi dalam :

1. Masa manusia belum berilmu, dan
2. Masa manusia mulai berangsur-angsur mengenal ilmu yang timbul karena perkembangan dari pengetahuan dan cara berfikir sistimatis dan metodis.

Bagi manusia pada masa belum berilmu, baginya alam ini merupakan satu kesatuan dan setiap gejala alam yang dialaminya ditanggapi sebagai sesuatu yang ajaib, dan bahkan dirasakan sebagai sesuatu yang harus ia ikuti dan bahkan harus ia takuti.

Ketakjubannya atas gejala dan kebesaran alam menimbulkan fantasi takhyul yang lambat laun menjadi pegangan hidupnya.

Fantasi dan angan-angan membentuk barang khayalan yang indah di samping juga yang buruk yang tak ada dalam dunia yang nyata.

Dan dari sinilah timbul keinginan manusia untuk mencari kebenaran, agar dapat kembali ke dunia yang nyata. Manusia lalu ingin mengetahui apa yang dilihatnya, apa yang dialaminya dari gejala alam itu, sehingga dalam hatinya timbul keinginan untuk mengungkapkan rahasia alam itu, karena ternyata, bahwa hal-hal yang ditakuti bermanfaat bagi kehidupannya.

Ia mulai menyangka dan berfikir bahwa alam ini dapat ditembusnya dengan akal. Ia berpendapat bahwa di samping alam macro ada pula alam micro di mana manusia akan berpaling padanya dan bertanya, apakah yang harus manusia perbuat dan apa kewajibannya (kewajibanku) dalam dunia ini.

Dari sikap mental yang demikian ini, akhirnya berkembang dua jenis pemikiran yaitu pemikiran tentang kosmos dan pemikiran tentang etika. Dan dengan ini mulailah periode yang kedua.

Dari dua pokok pemikiran inilah, lama kelamaan terjadi cabang-cabang ilmu pengetahuan.

Di dalam menghadapi alam nyata, yang hampir tak tentu batasnya dan tidak terbilang jumlah bagiannya dan soalnya, maka masing-masing ilmu akan mengambil satu masalah, yang akan diselidiki dan dikupasnya untuk diketahui kedudukannya dan hubungan sebab-akibatnya. Ini berarti bahwa masalah-masalah yang lain disisihkan dahulu dari penelitiannya, agar tidak terlalu mempengaruhi masalah yang sedang dipelajarinya. Karena itu tiap ilmu hanya menyelidiki satu masalah saja.

Dengan demikian masalah yang lain, menjadi *bagian* dan *sasaran* dari pada ilmu lain yang akan mempelajarinya dan menjelaskannya.

Dengan demikian ilmu hanya memiliki satu bidang masalah penyelidikan saja dan masalah itu merupakan satu golongan pengetahuan yang mengandung batasan-batasan dan karenanya suatu ilmu merupakan satu disiplin.

Tentang klasifikasi mengenai bidang ilmu, banyak sarjana membaginya dalam garis besarnya menjadi percabangan ilmu-ilmu pengetahuan sebagai berikut :

1. Dilihat dari obyeknya :
 - a. Ilmu pengetahuan Alam (Natural Sciences).
 - b. Ilmu Pengetahuan Kerokhanian (Humanities atau humaniora).
 - c. Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan (Social Sciences).

2. Dilihat dari kegunaannya :

Pure Sciences (ilmu pengetahuan murni).

Physics.

Astronomy.

Mathematics.

Chemistry.

Physiology.

Political Science.

Jurisprudence.

Zoology.

Botany.

Geology.

History

Economics.

Sociology.

Applied Sciences (ilmu pengetahuan yang diterapkan).

Engineering.

Navigation.

- Accounting.
 - Pharmacy.
 - Medicine.
 - Politics.
 - Law.
 - Animal husbandry.
 - Agriculture.
 - Petroleum engineering.
 - Journalism.
 - Business.
 - Administration, diplomacy.
 - Social Work.
3. Khusus ilmu sosial menurut WILSON GEE dalam bukunya yang kami kutip yang berjudul "Social Science Research Methods" dapat dibagi :
- a. **The Purely Social Sciences** : (ilmu pengetahuan sosial yang murni).
 - 1). Politics.
 - 2). Economics.
 - 3). History.
 - 4). Jurisprudence.
 - 5). Anthropology.
 - 6). Penology.
 - 7). Sociology.
 - b. **The semi-social sciences** : (setengah ilmu pengetahuan sosial).
 - 1). Ethics.
 - 2). Education.
 - 3). Phylosophy.
 - 4). Psychology.
 - c. **The sciences with social implications** : (ilmu pengetahuan yang mengandung masalah sosial).
 - 1). Biology.
 - 2). Geography.
 - 3). Medicine.
 - 4). Linguistics.
 - 5). Art.

Metode ilmu.

Seperti telah disebutkan di atas maka tiap-tiap ilmu memilih ma-

salah tertentu yang hendak diselidiki. Di dalam memilih masalah yang akan diselidiki ini, sebenarnya telah ditetapkan tentang ukuran apa yang dipakai, dan menjadi pedoman yang harus diikuti sepanjang penyelidikan itu.

Lazim di dalam ilmu, maka ukuran ini disebut metode ilmu, yang sebenarnya tidak lain dari pada satu *skema* atau bagan kerangka atau rencana kerja untuk menyusun masalah yang satu macam itu menjadi satu sistim pengetahuan.

Contoh misalnya : ilmu bintang-bintang, suatu ilmu yang paling tua, peninjauannya dari sumber pertanyaan/problema bagaimana peredaran bumi, bulan dan matahari dan bagaimana hubungannya satu dengan yang lain dan bagaimana hukum-hukumnya.

Ilmu kimia meninjau benda-benda itu terdiri dari apa; selanjutnya zat atau unsur apa yang menjadi asalnya serta bagaimana hubungannya zat atau unsur itu dari tiap-tiap benda.

Demikian juga dengan ilmu hukum, yang akan meninjau dari satu aspek kehidupan manusia yaitu yang menyangkut masalah *hak* dan *kewajiban*, serta *keadilan*.

Ilmu ekonomi, yang akan meninjau dari salah satu aspek kehidupan manusia, yaitu kehidupan ekonominya, yang mempersoalkan bagaimana usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tercipta kemakmuran dan kesejahteraan bagi umat manusia.

Selanjutnya kita perhatikan segi lain dari metode ialah cara apa yang dipakai dalam mengupas masalahnya pada setiap ilmu.

Tentang macam-macam metode ilmu yang digunakan sesuai dengan pembedaan di atas dapat dibedakan secara garis besarnya seperti diuraikan oleh Dr. MOHAMMAD HATTA dalam bukunya yang berjudul "Pengantar ke jalan ilmu pengetahuan", halaman 30 yaitu :

- a. Metode abstraksi (dari kenyataan sampai teori).
- b. Metode historika (menurut sejarah),

atau oleh Prof. SELO SOEMARDJAN dalam bukunya yang berjudul "Setangkai Bunga Sosiologi", halaman 15 dan 16 di mana terdapat dua metode yaitu :

- a. Metode kualitatif.
- b. Metode kwantitatif.

Metode kualitatif.

Metode ini mengutamakan bahan yang sukar dapat diukur dengan angka-angka atau dengan ukuran-ukuran lain yang exact, meskipun bahan-bahan itu terdapat dengan nyata di dalam masyarakat.

Metode kuantitatif.

Yaitu metode yang mengutamakan bahan-bahan keterangan dengan angka-angka, sehingga gejala yang ditelitinya dapat diukur dengan menggunakan skala-skala, index-index, tabel-tabel dan formula-formula yang sedikit banyak harus menggunakan ilmu pasti.

Dari uraian di atas dan berdasarkan pelbagai literatur tentang ilmu pengetahuan, kiranya dapatlah disimpulkan bahwa :

1. Ilmu pengetahuan itu tidak timbul secara mendadak, melainkan melalui suatu proses (perkembangan) yang memakan waktu bertahun-tahun lamanya, bahkan menurut uraian dalam "Encyclopaedia Americana", International Edition, copyright 1971, halaman 771, disebutkan bahwa dalam rangka menelaah "Law of gravitation" untuk sampai pada rumus yang sederhana yaitu $V = gt$, manusia telah membutuhkan waktu kurang lebih 1000 tahun.
2. Proses termaksud merupakan suatu perkembangan yang berbentuk lingkaran (cyclus) tetapi selalu berkaitan antara :
phenomena → observasi → pemikiran → (metode ilmiah) → teori → pengujian pada fenomena → observasi → pemikiran → (metode ilmiah) → (menghasilkan hukum/dalil / rumus / teori) → pengujian dan eksperimen → observasi → pemikiran dan sebagainya (menghasilkan teori baru), dan seterusnya.

Teori yang telah mengalami percobaan dan pengujian serta ber-sumber pada fenomena atau fakta itulah yang akhirnya disebut ilmu, yang dalam pemakaiannya kadang-kadang dilupakan, bahwa unsur phenom-ena (fakta, praktek) merupakan unsur pelengkap yang mutlak di sam-ping teori.

Dengan perkataan lain, ilmu mengandung dua unsur hakiki, yaitu :

1. Phenomena atau fakta yang dijumpai dalam praktek hidup.
2. Teori murni yang merupakan hasil pemikiran dengan metode ilmiah dari fenomena yang diobservasi/ditinjau.

B. PROSES TIMBULNYA ILMU KEPOLISIAN.

Dengan mempergunakan pola dasar pemikiran tentang proses timbulnya ilmu pada umumnya, maka demikian pulalah proses timbulnya ilmu kepolisian, walaupun perlu diingat, bahwa semasa ilmu kepolisian ini

timbul, ilmu pengetahuan eksakta dan ilmu pengetahuan sosial lainnya sudah banyak yang berkembang dan maju, sehingga sudah diakui sebagai ilmu dan sedikit banyak telah mempengaruhi, melengkapi dan dipergunakan oleh ilmu kepolisian, baik dalam masa lahirnya, tumbuhnya maupun dalam strukturnya dan karena itu perkembangannya akan mengalami akselerasi.

Dengan metode demikian, maka pola dasar pemikiran tentang ilmu kepolisian ini akan diperoleh dengan cara memproyeksikan pola dasar pemikiran tentang ilmu pada umumnya kepada masalah Polisi atau Kepolisian, sehingga akan menghasilkan Ilmu Kepolisian yang merupakan suatu ilmu tentang Polisi atau tentang Hal Ikhwal Kepolisian.

Timbulnya hal ikhwal kepolisian dapat secara singkat digambarkan sebagai berikut :

Lebih dahulu kita dapat memandang adanya ancaman atau gangguan terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat sebagai fakta atau gejala masyarakat.

Arti ancaman dapat secara sederhana dirumuskan sebagai sesuatu yang mengancam ketenteraman individu atau sekelompok individu sehingga mereka merasa tidak aman atau bisa menimbulkan kerugian, sedang gangguan adalah ancaman yang sudah menjadi kenyataan.

Sumber ancaman/gangguan dapat datangnya dari alam atau dari luar masyarakat itu, tetapi juga dapat datang dari individu-individu itu sendiri. Akibat yang ditimbulkan oleh ancaman/gangguan tersebut di atas akan menimbulkan kerugian rokhaniah maupun jasmaniah serta harta materiil (harta benda). Hal itu disebabkan karena tidak setiap anggota masyarakat mematuhi peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah yang dibuat masyarakat itu, dan apabila pelanggaran sedemikian dibiarkan maka terancamlah keutuhan masyarakat, bahkan eksistensinya.

Fakta ancaman/gangguan itu akan sejalan dengan proses perubahan masyarakat sebagai sumbernya. Perubahan ini bisa secara revolusioner atau secara evolusioner, dan perubahan-perubahan ini tidak selamanya akan membawa kebahagiaan bagi manusia, bahkan seringkali menimbulkan kerugian-kerugian.

Social disorder (masyarakat yang menjadi tak tertib) adalah merupakan suatu masalah di dalam masyarakat yang kalau dibiarkan, akan menjadi masalah yang lebih parah kerana lembaga-lembaga kemasyarakatan tidak lagi dapat berfungsi sebagaimana mestinya, kerana adanya ancaman/gangguan dan pelanggaran ketertiban tersebut.

Suatu kekuatan dalam masyarakat itu akan timbul dan bertindak sebagai penengah dari pada sengketa yang terjadi kerana adanya gangguan

keseimbangan itu dan selanjutnya akan selalu aktif mengarahkan setiap disorder yang telah dan akan terjadi kearah tertib sosial.

Ancaman/gangguan yang timbul tersebut masih bersifat ancaman/gangguan biasa, dalam arti baru merupakan ancaman/gangguan terhadap norma ketertiban masyarakat biasa, belum terhadap norma hukum, sehingga merupakan ancaman/gangguan di luar hukum pidana. Tetapi ancaman/gangguan dapat pula bersifat suatu kejahatan atau kriminalitas, dan bahkan dapat berkembang menjadi kejahatan subversi dan kemungkinan juga dapat menjadi perang saudara. Bentuk ancaman/gangguan yang terhebat dan datangnya dari luar adalah perang.

Demikianlah sebagai kesimpulan sementara dapat dikatakan, bahwa ancaman sebagai fakta/phenomena masyarakat mempunyai pelbagai bentuk yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, yang akan selalu ada selama masyarakat itu ada, karena juga masyarakat itu sendirilah yang menjadi sumbernya. Ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat adalah merupakan masalah sosial yang kalau dibiarkan akan menjadi masalah yang lebih rumit, sehingga masyarakat akan mengalami disorganisasi dan disintegrasi, bahkan akan mengancam eksistensinya. Ini sesuai dengan dalil atau rumus yang dipelajari oleh sosiologi.

Namun kenyataan membuktikan, seperti telah diuraikan oleh Bapak KAPOLRI di depan LEMHANNAS pada bulan Oktober 1973, dengan mengutip prinsip-prinsip dari CHARLES REITH dalam bukunya "Police Principles and the Problem of War", yang menyatakan, bahwa : "banyak masyarakat telah lenyap, namun lebih banyak yang disebabkan karena ketidak mampuannya menegakkan hukum dari pada yang disebabkan oleh alam atau agresi musuh".

Demikianlah dari hasil observasi atas fakta atau gejala masyarakat yang disebut ancaman/gangguan itu dan ditujukan pada keamanan dan ketertiban masyarakat didapatkan, bahwa warga masyarakat tidak selalu mentaati sebagian atau bahkan seluruh peraturan yang berlaku sehingga membahayakan kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu manusia lalu mencari upaya untuk membuat agar peraturan-peraturan itu ditaati oleh setiap warga masyarakat dan agar upaya itu menjadi kunci untuk kelangsungan hidup masyarakat. Upaya yang dimaksud di sini merupakan suatu hasil observasi dan pemikiran yang dilakukan dengan ancaman/gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai obyeknya. Upaya itu merupakan sumber keperluan yang menimbulkan fungsi (tugas) dan organ Polisi.

Faham Amerika Serikat demikian itu dapat dimengerti, kalau meninjau sejarah kejahatan yang melanda Amerika Serikat di tahun tahun antara '20 dan '30-an, yang menghasilkan nama-nama penjahat ulung seperti : AL CAPONE, JOHN DILLINGER, MA BAKER, BABY FACE NELSON dan sebagainya. Untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan itu, yang dalam masanya hampir tak ada taranya, bukan saja bagian kriminalnya harus ditingkatkan, tetapi seluruh administrasi kepolisian dalam arti luas termasuk pengorganisasiannya, tatasiaganya, sistim operasinya dan sebagainya perlu dirombak dan diperbaiki. Maka tak heranlah kalau police administration menjadi berkembang dan bahkan dijadikan ilmu setelah terkena pengaruh perkembangan ilmu "public administration".

Sebaliknya di Anglo-Saxon dan Eropa masalah penanggulangan kejahatan terletak pada pembuktiannya di depan pengadilan, sehingga mula-mula di Perancis berkembang "police scientifique" (= polisi yang ber-ilmu pengetahuan) karena memasukkan ilmu-ilmu pengetahuan eksakta dan sosial ke dalam kepolisian untuk menyeret para pelaku kejahatan di depan pengadilan. Maka berkembanglah forensic sciences atau kriminalistik. Demikianlah Indonesia yang ingin membekali para pejabat kepolisian yang merupakan tenaga inti pelaksana dan calon pimpinan dengan segala ilmu pengetahuan yang berguna, memandang obyek ilmu kepolisian ialah keseluruhan hal-ikhwal kepolisian, sehingga batasannya kurang lebih sebagai berikut :

- ilmu kepolisian ialah suatu ilmu yang mempelajari hal ikhwal kepolisian, terutama seg-segi hakekat ancaman dan gangguan karn-tibmas, polisi sebagai fungsi dan organ, dengan tujuan menghasilkan pelaksanaan tugas polisi setinggi-tingginya. --

BAB III

FUNGSI PTIK DALAM Mendukung Pembangunan POLRI

Membicarakan ilmu kepolisian menurut faham Indonesia melalui pengertian-pengertian proses pertumbuhannya, materinya, batasannya dan sebagainya pastilah tak dapat dipisahkan dari lembaga PTIK sebagai wadahnya, karena memang demikianlah faktanya. Karena itu dalam Bab ini akan dicoba menguraikan secara ringkas fungsi PTIK terutama dalam peranannya mendukung pembangunan POLRI.

A. SEDIKIT SEJARAH PTIK

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 17 Juni 1946 No. Pol. : 21/19/22 mengesahkan berdirinya Sekolah Polisi Negara yang mempunyai 3 bagian, ialah :

1. Bag. Rendah di Sukabumi,
2. Bag. Menengah dan
3. Bag. Tinggi di Mertoyudan (Magelang).

Ketika diresmikan, yang dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden R.I., Bagian Tinggi tersebut disebut : AKADEMI POLISI. Peraturan mengenai Akademi ini pun belum menyertainya, karena yang ada masih peraturan tentang Bagian Tinggi tersebut.

Baru pada tanggal 4 Mei 1947 dengan Surat Keputusan Kepala Jawatan Kepolisian Negara No. Pol. : 20/2/47/P. ditetapkan Peraturan Dasar Akademi Polisi yang antara lain memuat tujuannya sebagai berikut :

"Untuk mendapatkan tenaga kepolisian yang berpendidikan akademis, agar mampu memecahkan persoalan-persoalan aktual yang dihadapi dengan cepat, tepat, sesuai dengan situasi dan kondisinya serta mampu berfikir secara metodelis, sistematis dan obyektif".

Ditinjau dari kaca-mata sejarah, maka terjadinya hal-hal tersebut di atas dapat dimengerti, karena :

1. masih dalam suasana perjuangan,
2. tak memungkinkan berfikir tenang, meneliti mendalam dan berkomunikasi luas.

Para pemrakarsa dan pendiri agaknya hanyalah mengandalkan kepada kelaziman atau "mos" Akademis, bahwa suatu pendidikan tinggi seyogyanya ditempatkan dalam wadah Akademi, Universitas (Perguruan Tinggi) atau Sekolah Tinggi.

Ketika kuliah-kuliah dimulai, terutama oleh para Guru Besar yang telah mempunyai nama sebagai dosen sejak zaman Belanda, seperti : Prof. Mr. Dr. SOEPOMO, Prof. Mr. SOENARTO KOLOPAKING, Prof. Mr. DJOKOSOETONO, Prof. Dr. PRIJONO, maka sudah mulai terasa kesulitannya mengenai angkutan dan komunikasi, sehingga pada akhir September 1946 Akademi Polisi dipindahkan ke Yogyakarta.

Dari tujuan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa fungsi Akademi Polisi titik beratnya diletakkan pada memenuhi kebutuhan akan tenaga-tenaga Polisi yang berpendidikan Akademi dari pada ilmu yang diajarkannya.

Selanjutnya bagian lain yang penting dalam Peraturan Dasar ialah : "Dengan tidak mengurangi kekuasaan Pembentuk Undang-Undang Negara dalam mengatur Perguruan Tinggi pada umumnya dikemudian hari, Jawatan Kepolisian Negara mengadakan Akademi Polisi tersendiri", yang membuktikan sekali lagi suasana yang kurang mengizinkan untuk berbuat yang cukup sempurna, sekaligus menggambarkan, bahwa Perguruan Tinggi atau Akademi lainnya belum banyak, dan Undang-Undang Perguruan Tinggi belum tersusun. Hal lain yang dapat diungkapkan ialah, sudah ada gagasan yang mengarah pada Perguruan Tinggi.

Selanjutnya berhubung agresi Belanda yang kedua mengakibatkan pendudukan kota Yogyakarta, maka para mahasiswanya terpancar dan sebagian besar melakukan perjuangan di luar kota, sehingga pendidikan ini berhenti untuk beberapa waktu lamanya.

Baru pada tingkat 1 September 1950, sebagai pelaksanaan dari keputusan rapat gabungan antara Jawatan Kepolisian Negara, Dewan Kurator dan Dewan Guru Besar Akademi Polisi pada tanggal 4 Juli 1950, Akademi Polisi dibuka kembali dengan nama: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atas dasar pertimbangan a.l.: "karena pendidikan ini bertingkat universitas serta untuk memajukan ilmu kepolisian". Syahdan dengan rumusan yang sederhana itu PTIK beserta ilmu kepolisiannya diresmikan. Apabila hal ini dihubungkan dengan tujuan semula (ketika masih Akademi), maka layaklah kalau disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan ilmu kepolisian di sini, ialah sebagaimana yang diuraikan dalam bab yang terdahulu. Juga, bahwa hakekat fungsi PTIK ialah: menghasilkan tenaga-tenaga kepolisian yang terdidik Akademis (baca ilmiah) karena berilmu kepolisian demi suksesnya pelaksanaan tugas polisi.

B. FUNGSI PTIK DALAM Mendukung Pembangunan POLRI.

Dengan uraian tersebut pada Sub-bab A mengenai hakekat fungsi PTIK, maka sekali lagi dapat ditegaskan, bahwa fungsi PTIK mempunyai dua unsur pokok, ialah :

1. menghasilkan tenaga-tenaga Polisi yang terdidik akademis/ilmiah,
2. mengembangkan ilmu kepolisian faham Indonesia.

dengan tujuan tunggal :

= melaksanakan tugas kepolisian dengan hasil yang setinggi-tingginya.

Mengingat bahwa PTIK (baca: Akademi Polisi) lahir di tengah-tengah kancah perjuangan bangsa mencapai kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negaranya, maka kiranya dapat difahami, bahwa fungsi PTIK ini sejak semula erat hubungannya dengan pembangunan POLRI. Betapa tidak ! Ketika organ atau badan Polisi yang sekarang ini disebut Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) ditinggalkan sebagai warisan oleh Pemerintah Belanda dan Jepang, maka organ ini dihadapkan pada kenyataan yang mendadak, ialah, bahwa sebagian besar tenaga pelaksana inti dan pimpinan terbabat hilang, sebab merupakan tenaga-tenaga asing yang ikut hilang dengan lenyapnya penjajahan. Bukankah untuk menggantinya dibutuhkan pembangunan ? Dan memang fakta telah menunjukkan, bahwa angkatan demi angkatan yang telah lulus dari PTIK segera terserap dalam praktek kepolisian, seolah-olah telah ditelan dengan lahapnya, karena memang sangat kehausan dan kelaparan sampai sekarang ini.

Hal ini mengibatkan, bahwa para lulusan itu, walaupun PTIK sudah berdiri 29 tahun lamanya, belum ada seorangpun yang sempat membuat promosi untuk mencapai gelar tertinggi di bidang ilmiah.

Kalau di atas telah diuraikan tentang hakekat fungsi PTIK, maka dapat dijelaskan pula, bahwa perubahan-perubahan peraturan yang mengatur PTIK hingga sekarang, merupakan penghias dan variasi dari kehidupan PTIK, sehingga sistim pendidikan HANKAMNAS, yang mempengaruhi pula kehidupan PTIK, dalam rangka integrasi ABRI dapat dipandang dari segi itu, sebab bagaimanapun juga, pendidikan tinggi bagi Perwira Polisi dewasa ini dan dimasa datang, merupakan suatu syarat mutlak, yang juga dirasakan oleh kepolisian di negeri-negeri yang sudah maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman Barat dan Jepang, walaupun caranya mencapai berlain-lainan.

Dalam rangka pembangunan HANKAMNAS cq POLRI, terutama memenuhi rencana strategi HANKAM sampai tahun 1978.

... jelas memberikan peranan yang sangat menentukan bagi PTIK, karena merupakan salah satu sarana yang sudah ada untuk meningkatkan kualifikasi personilnya. Suatu cara baru akan memakan biaya, waktu, pengalaman dan ketrampilan yang jelas tidak sedikit. Padahal justru faktor-faktor yang harus dihadapi POLRI meningkat, seperti :

- penambahan penduduk.
- akibat samping dari pembangunan.
- kemajuan teknologi, yang membawa kemajuan sarana kejahatan
- peningkatan penggunaan kekerasan dalam mencapai tujuan-tujuan politik di forum internasional.
- peningkatan kegiatan subversi sebagai salah satu unsur dari perang total.
- meningkatnya jaringan komunikasi, yang mendekatkan Indonesia dalam pergaulan internasional dengan segala akibatnya baik yang manfaat maupun yang buruk.

Dengan gambaran tersebut di atas, jelaslah kiranya, bahwa pada semua lembaga pendidikan POLRI diletakkan tanggung jawab yang besar, termasuk pada PTIK, yang menyelenggarakan pendidikan keahlian matra POLRI.

C. KURIKULUM PTIK SEBAGAI SARANA PELAKSANAAN FUNGSI.

Kurikulum ini telah mengalami peninjauan yang menentukan dalam bulan Pebruari tahun ini, terutama untuk mensinkronisasikan pelajaran-pelajaran di :

- Sesko ABRI bagian Kepolisian.
- PTIK.
- Akabri bagian Kepolisian, dan
- Sekopol.

Sesuai dengan pola berfikir tentang ilmu kepolisian, sebagai sarana memperkembangkan materi ilmu itu dan sekaligus sebagai sarana pendidikan, telah disusun prinsip-prinsip menentukan kurikulum sebagai berikut :

1. Mata pelajaran/kuliah dibagi dalam 3 jenis pokok, yaitu :
 - . pokok
 - . penting
 - . pelengkap
2. selanjutnya dibagi dalam 5 sifat, yaitu :
 - . universiter-universil (ilmu sosial dan eksakta yang lain),
 - . profesi kepolisian (teknis, taktis, dasar-dasar strategis),
 - . universiter-profesi (ilmu kepolisian sebagai teori),
 - . kepeljuaan dan integrasi ABRI (ilmu Hankam dan pengetahuan tentang Angkatan),
 - . lain-lain;

3. segala sesuatu untuk mencapai :

- . kemampuan akademis (universiter),
- . kemampuan operasionil dalam arti penggunaan kekuatan.
- . kemampuan operatip dalam arti: pembinaan kekuatan.

Selanjutnya memperhatikan pokok-pokok materi seperti :

- . hakekat ancaman/gangguan kamtibmas
- . polisi sebagai tugas (fungsi)
- . polisi sebagai organ

Dalam rangka inilah maka tersusun suatu kurikulum sebagaimana terlampir, yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut :

1. untuk menunjang materi hakekat ancaman/gangguan diberikan kuliah tentang :

- pengantar ilmu kepolisian
- pengantar administrasi kepolisian
- sosiologi umum dan khusus
- sejarah sosial-budaya Indonesia
- kriminologi khusus
- pengetahuan kesejahteraan masyarakat dan ilmu sosial praktis
- ilmu pertahanan nasional
- pengantar ilmu politik
- intelligence
- social defence
- psikologi sosial

2. untuk menunjang materi polisi sebagai tugas, diberikan kuliah-kuliah berikut :

- Pancasila, Nilai2 '45 dan GBHN
- kriminalisitik
- pelbagai ilmu pengetahuan tentang hukum dan falsafahnya
- public administration
- perbandingan sistim kepolisian
- metode research
- intelligence lanjutan
- sistim operasionil Polri

D A F T A R - K E P U S T A K A A N

1. BEERLING, RF. PROF. DR. *Filsafat dewasa ini*, Dinas Penerbitan Balai Pustaka, Cetakan ke-III, Jakarta, 1961.
2. DOLF RIESER, *Art & Science*, 1972 Van Mostrand Reinhold Co.
3. GLIFFORD BARRETT, *Phylosophy*, The Mac. Millan Company, New York, USA, 1954.
4. GOODE J. WILLIAM & HATT PAUL K., *Methods in Social Research*, Mac Graw Hill Book Company, Inc. 1952.
5. HARSOJO, Prof., *Apakah Ilmu itu dan Ilmu gabungan tentang tingkah laku manusia*, penerbitan Fakultas Keguruan Ilmu Sosial IKIP Bandung, 1972.
6., *Pengantar Anthopology*, Penerbit Binacipta, Jakarta, 1967.
7. HAZAIRIN, Prof. DR. SH, *Demokrasi Pancasila*, Tintamas, Jakarta, 1970..
8., *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur-an dan Hadith*, Tintamas, cetakan keempat, Jakarta, 1967.
9. HILLWAY THYRUS, *Introduction to Research*, Houghton Mifflin Company, Boston.
10. KOENTJARANINGRAT, Prof. DR. *Pengantar Anthropologi*, P.D. Aksara, Jakarta.
11. KOOKEN, DON.L, *Ethics in Police Service*, Charles C. Thomas Publishers, Springfield Illinois. USA, Copy 1957.
12. MANDELBAUM MAURICE, icc., *Philosophie*, The MacMillan Company, New York, USA, 1958.
13. MAN & THE UNIVERSE, *The Philosphers of Science*, Saxe Commins and Robert N. Linscott Modern Pocket Library, New York, 1947.
14. MOHAMMAD HATTA, *Pengantar ke jalan ilmu dan pengetahuan*, P.T. Pembangunan, Jakarta, 1964.
15. OUDANG M. *Perkembangan Kepolisian di Indonesia*, Mahabrata, Jakarta, 1952.
16. PTIK. *Buku Peringatan Dies Natalis PTIK*, Jakarta, 1952.
17. PUDJAWIJATNA, Prof. I.R., *Tahu dan Pengetahuan*, P.T. Pembangunan Jakarta, cetakan ke-II, 1966.

18., *Pembimbing ke arah alam filsafat.*
19. REITH CHARLES, *Police Principles and the Problem of War*, Oxford University London, New York Toronto, 1940.
20. SNYDER LOUIS L., *Abad pemikiran*, terjemahan S. Pendit Bharata, Jakarta, 1962.
21. SOEMARDJAN SELO DR. – SOEMADI SOELAIMAN SH, MA, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1964.
22. SULLIVAN JOHN L., *Introduction to Police Science*, McGraw Hill Book Company, 1966 New York – Toronto – London, 1950.
23. WILSON GEE, *Social Science Research Methods*, AppletonCentury Grofts, Inc, 1950.
24. WILSON O.W., *Police Administration*, McGraw Hill Book Company, Inc., New York, Toronto, London, 1950.
25. WINARNO SURACHMAD Dr., *Dasar dan Tehnik Research*, C.V. Tersito Bandung, 1970.

BROSUR – DIKTAT

26. HENRY LOHMANN, *The system Approach to Education*, Audivisual Instruction, 1968.
27. MARDJAMAN Drs., S.H., *Perbandingan Sistim Kepolisian*, Kuliah PTIK, 1972/1973, PTIK.
28. MOCHTAR KUSUMAATMADJA Prof. Dr., *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Fakultas Hukum, Universitas Pajajaran, Bandung, 1970.
29. MOERSALEH M.Sc., Drs. Brigjen. Pol., *Pidato Dies PTIK ke-2, Penelitian Kepolisian (suatu percobaan Tinjauan Perbandingan)* PTIK, 1973.
30. PHIL ASTRID S. SUSANTO Ny. Dr. *Perubahan Sosial di Indonesia dalam rangka Pembangunan*, Markas Besar TNI Angkatan Darat, Sekolah Staf dan Komando, 1971.
31. PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN, *Risalah Perjuangan Status PTIK*, 1960. Jakarta.
32. SAYONO Drs., *Pengantar Ilmu Kepolisian*, Kuliah PTIK 1967/1968, PTIK, Jakarta.

Mata Kuliah tingkat Bekaloret
Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian

Sifat	Mata Kuliah	Jumlah Jam
1	2	3
A. UJIAN	1. Pengantar Adm. Kepolisian	30
	2. Pengantar Ilmu Kepolisian	30
	3. Kriminalistik	30
	4. Capita Selecta Hukum Pidana Hukum Acara Pidana	30
	5. Panca Sila, Nilai2 45 dan Garis2 Besar Haluan Negara, serta kepejoangan ABRI	30
	6. Sejarah Kepolisian R.I.	30
	7. Pengantar Ilmu Hukum/ P.T.H.I.	30
	8. Sosiologi Umum	30
	9. Sejarah Sosial Budaya Indonesia	30
B. TESTIMONIUM	1. Hukum Adm. Negara	30
	2. Bahasa Inggris	30
	3. Olah Raga	30
Jumlah jam kuliah		360 jam.

LAMPIRAN

**Mata Kuliah tingkat Doktoral I
Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian**

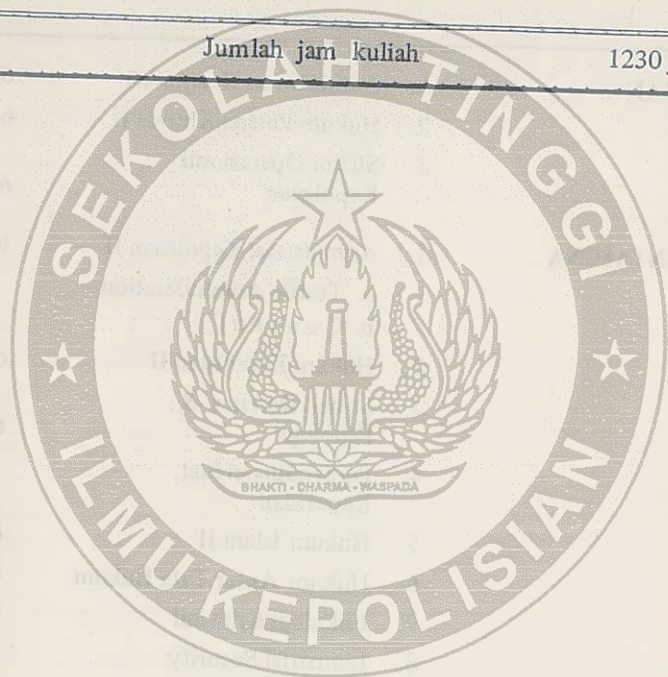
Sifat	Mata Kuliah	Jumlah Jam
1	2	3
A. UJIAN	1. Hukum Kepolisian I	60
	2. Adm. Kepolisian I	60
	3. Sosiologi Khusus I	60
B. TENTAMEN	1. Public Administration	60
	2. Kriminologi Khusus II	60
	3. Perbandingan Sist. Kepol.	60
	4. Pengetahuan Kesejahteraan Masy. dan Ilmu Sosial Praktis	60
	5. Hukum Antar Negara	60
	6. Hukum Perdata & Hukum Acara Perdata.	60
	7. Hukum Pidana Khusus I	60
	8. Hukum Adat II	60
	9. Ilmu Pertahanan Nasional	60
	10. Pengantar Ilmu Politik	60
	11. Methode Research	60
	12. Kriminallistik lanjutan :	
– Pemeriksaan Dokumen	30	
– Balistik	30	
– Toxicologi	30	
– Ilmu Kedokteran Kehakiman	30	
– Ilmu Kedokteranan Gigi Kehakiman	30	

C. TESTIMONIUM

1. Intelligence Lanjutan	30
2. Adm. Behaviour & Falsafah Management	30
3. Hukum Dagang	30
4. Bahasa Inggris	60
5. Bahasa Indonesia	60
6. Olah Raga	60

Jumlah jam kuliah

1230 jam



LAMPIRAN

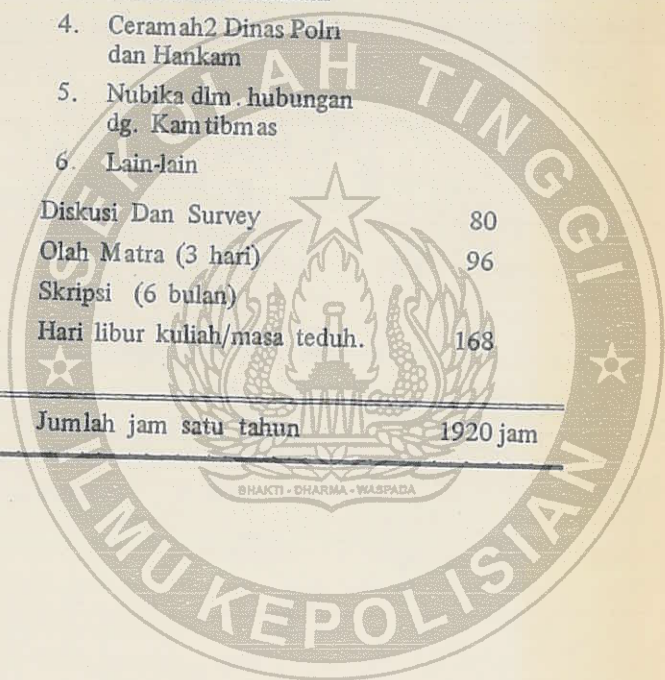
**Mata Kuliah Tingkat Doktoral II
Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian**

Sifat	Mata Kuliah	Jumlah Jam
1	2	3
A. UJIAN	1. Administrasi Keamanan	60
	2. Hukum Pidana Khusus II	60
	3. Sistem Operasional Kepolisian	60
B. TENTAMINA	1. Administrasi Kepolisian II	60
	a. Traffic Administration	
	b. Control	
	2. Hukum Kepolisian II	60
	3. Sosial Defence & Penologi	60
	4. Perbandingan Sist. Kepolisian	
	5. Hukum Islam II	60
	6. Hukum Antar Tata Hukum	60
	7. Psikologi Kriminil	60
8. Industrial Security	30	
	9. Falsafah Hukum	30
C. TESTIMONIUM	1. Psikologi Sosial	30
	2. Sejarah Pergerakan Indonesia	30
	3. Ekonomi Pembangunan	30
	4. Bahasa Inggris	60
	5. Bahasa Indonesia	60
	6. Olah Raga	60

D. GUEST LECTURE dan waktu Pimpinan

414

1. Neutron activation analysis	
2. Management :	
a. Personil	
b. Materiil	
c. Keuangan	
3. Pembinaan Rokhani	
4. Ceramah2 Dinas Polri dan Hankam	
5. Nubika dlm. hubungan dg. Kamtibmas	
6. Lain-lain	
Diskusi Dan Survey	80
Olah Matra (3 hari)	96
Skripsi (6 bulan)	
Hari libur kuliah/masa teduh.	168
<hr/>	
Jumlah jam satu tahun	1920 jam



1. Sejarah Sekolah
2. Maksud dan Tujuan
3. Organisasi
4. Struktur
5. Keuangan
6. Pembinaan Kelembagaan



RECEIVED